

SKRIPSI

**KONFLIK DALAM PEMERINTAHAN SOEKARNO-HATTA PASCA
PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI PADA TAHUN 1945-1966**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penulisan skripsi
sarjana sastra satu (1) Pada pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh

SITI ASNI
NIM 11315A0010

**PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

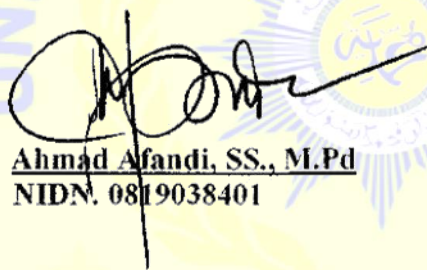
SKRIPSI

KONFLIK DALAM PEMERINTAHAN SOEKARTNO-HATTA PASCA
PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI PADA TAHUN 1945-1966

Telah memenuhi syarat dan disetujui
tanggal, 2018

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,



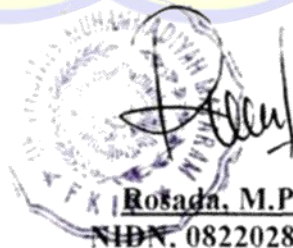
Ahmad Afandi, SS., M.Pd
NIDN. 0819038401



Dewita Harthanti, S.Pd., M.Si
NIDN. 0827128501

Menyetujui:

Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Ketua Program Studi,



Rosada, M.Pd
NIDN. 0822028401

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KONFLIK DALAM PEMERINTAHAN SOEKARTNO-HATTA PASCA
PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI PADA TAHUN 1945-1966

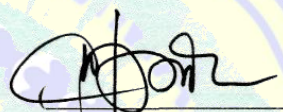
Skripsi atas nama Siti Asni telah dipertahankan di depan
dosen penguji Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Pada tanggal, 25 Juli 2018

Dosen Penguji:

1. Ahmad Afandi, SS., M.Pd
NIDN. 0819038401

(Ketua)



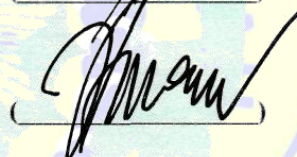
2. Dian Eka Mayasari, M.Pd
NIDN. 0830098802

(Anggota)



3. Ilmiawan Mubin, M.Pd
NIDN. 0811108504

(Anggota)



Mengesahkan:

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,



Dr. Hj. Maemunah, S. Pd., MH
NIDN 0802056801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Siti Asni

NIM : 11315A0010

Alamat : Jl. Lngkar Selatan Perumahan Manunggal Mataram

Memang benar Skripsi yang berjudul **Konflik Dalam Pemerintahan Soekartno-Hatta Pasca Proklamasi Kemerdekaan Ri Pada Tahun 1945-1966** adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 2018
Yang membuat pernyataan,



SITI ASNI
NIM 11315A0010



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI ASNI
NIM : 11317A0010
Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa 10 Juli 1999
Program Studi : Pendidikan sejarah
Fakultas : FKIP
No. Hp/Email : 082 340 828939
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Konflik dalam pemerintahan Soekarno Hatta pasca proklamasi kemerdekaan RI pada tahun 1949-1966.

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 12 Maret 2020

Penulis



Mehgetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

**Perjuangan tak akan mengkhianati hasil
jadi, tetaplah semangat jangan ada kata
menyerah dalam perjuangan**



HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Karya ini ku Persembahkan untuk Tuhan yang Maha Esa penguasa jagatraya, karena atas rahmat dan karunianya yang tak terhingga sehingga pendidikan dan ilmu dapat kuraih di kampus hijauini.
2. Cucuran air mata dan ketulusan hati kedua orang tuaku (ayahanda Surandi dan ibunda Siti Hawa) yang selalu menyirami hidupku dengan cinta dan kasih sayang serta motivasi untukku agar selalu tetap semangat.
3. Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tidak terhingga kepada ka Tari dan ka Yani dan kedua adik tercinta Nur dan Nisa yang telah memberiku dukungan.
4. Ucapan terimakasih dan tanda cinta yang tulus untuk kakanda Muhdar Ali David yang selalu memberikan dukungan untuk selalu tetap semangat.
5. Terimakasih pula untuk para sahabat yang selalu menemaniku selamaaku di kampus hijau, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan pula.
6. terimakasih pula untuk almamaterku tercintaku.

KATA PENGANTAR

Segala puji senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt, Tuhan pengampun dosa, penerima taubat, penzabah doa setiap insanya yang ada di jagat raya, yang menguasai isi langit dan bumi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Solawat dan salam akan selalu terlantun dari umatnya yang bartaqwa kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw beserta keluarga dan parasahabatnya sampai akhir zaman.

Dengan selesainya skripsi ini, maka penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tiada tara kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan, saran-saran dan informasi yang sangat berharga, penulis tunjukan pada.

1. Bapak Dr. H. Arsyad Ab. Gani, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibunda Dr. Hj. Maemunah, S.Pd.,MH, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ahmad Afandi, M.Pd dan Ibu Dewita Hartanti dosen pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Para dosen dan segenap civitas akademik yang telah memberikan bimbingan dan pendidikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Mataram.

5. Kedua orang tuaku (ayahanda Surandi dan ibunda Siti Hawa), kakak-kakaku, adik-adikku dan sahabatku serta segenap keluarga yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun material sehingga penulis dapat menimba ilmu dan menyelesaikan pendidikannya di kampus hijau ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan.

Segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepada-Nya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT meridhoinya. (Aamiin)

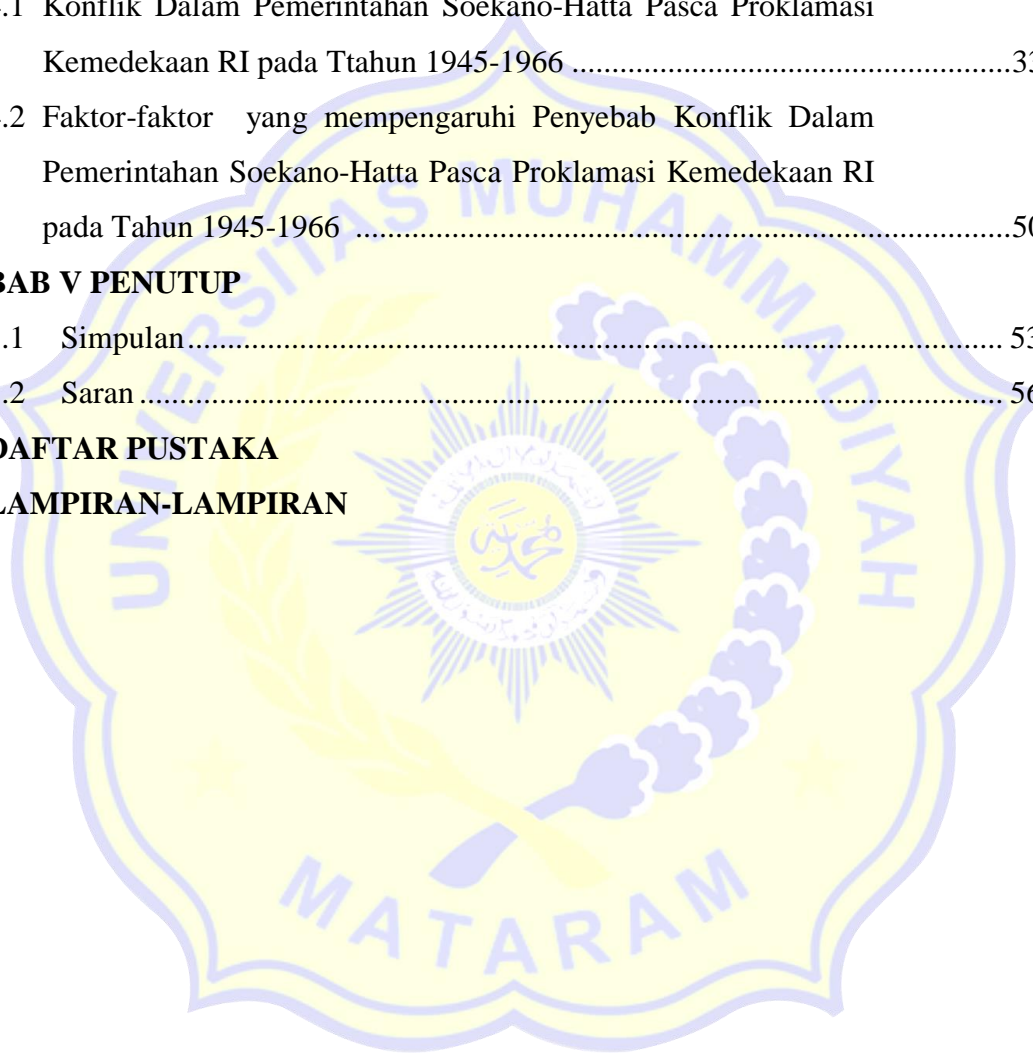
Mataram, 2018
Penulis,

SITI ASNI
NIM 11315A0010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1 Manfaat Praktis	4
1.4.2 Manfaat Teoritis	5
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Konflik	6
2.1.1 Bentuk-Bentuk Konflik.....	11
2.1.2 Konflik berdasarkan pihak yang terlibat dalam konflik.....	12
2.1.3 Dampak Konflik	14
2.2 Pemerintahan	15
2.3 Pemerintahan Soekarno-Hatta	16
2.4 Proklamasi Kemerdekaan.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Batasan Spesial	24
3.3 Batasan Temporal	24
3.4 Data dan Sumber Data	25
3.4.1 Sumber Data	25
3.5 Metode Historis	28
3.6 Analisis Data.....	29

3.6.1 Reduksi Data	29
3.6.2 Data <i>Display</i> (penyajian data).....	30
3.6.3 Penarikan/Verifikasi Kesimpulan	31
3.7 Keabsahan Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Konflik Dalam Pemerintahan Soekano-Hatta Pasca Proklamasi Kemedekaan RI pada Tahun 1945-1966	33
4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyebab Konflik Dalam Pemerintahan Soekano-Hatta Pasca Proklamasi Kemedekaan RI pada Tahun 1945-1966	50
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	53
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



Siti Asni, 2018: “ Konflik Dalam Pemerintahan Soekarno-Hatta Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI Pada Tahun 1945-1950”.FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dosenpembimbing I : Ahmad Afandi, M.Pd

Dosenpembimbing II: Dewita Hartanti, M.Pd

ABSTRAK

Soekarno dan Moh.Hatta dikenal sebagai Bapak Ploklamator beliau mempunyai peran penting dalam memerdekkakan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945. Pada tanggal 18 agustus 1945 beliau menjadi panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian. Soekarno dan Moh.Hatta adalah presiden dan wakil presiden Indonesia pertama, beliau memimpin Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan 1966 ia memainkan peranan penting untuk memerdekkakan bangsa Indonesia dari penjajah belanda. Rumusan masalah dalam penelitianini adalah “(1) Bagaimanakah Konflik Dalam Pemerintahan Soekarno-Hatta Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945-1966 dan (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Konflik Dalam Pemerintahan Soekarno-Hatta Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945-1966”.

Konflik yang terjadi dalam Pemerintahan Soekarno-Hatta pasca proklamasi RI Pada tahun 1945-1966 adalah bentuk dari perebutan kekuasaan dan lainnya. Berikut ini adalah hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait kasus konflik dalam Pemerintahan Soekarno-Hatta pasca Proklamasi RI pada tahun 1945-1966 yang pernah terjadi di Indonesia, diantaranya: (1) Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil yang terjadi pada tahun 1950, (2) Negara Islam Indonesia (NII) yang terjadi pada tahun 1949, (3) Pemberontakan PKI yang terjadi pada tahun 1965, dan (4) Surat perintah 11 Maret yang dikeluarkan pada tahun 1966.

Kata Kunci : *Konflik, Pemerintahan Soekarno-Hatta, Pasca Proklamasi 1945-1966*

SitiAsni, 2018: "Conflict In Soekarno-Hatta Government Post-Proclamation of Independence of the Republic of Indonesia In 1945-1950". FKIP Muhammadiyah University of Mataram.

*Counselor I: Ahmad Afandi, M.Pd
Lecturer II: Dewita Hartanti, M.Pd*

ABSTRACT

Soekarno and Moh.Hatta is known as Mr. Ploklamator he has a crucial role in liberating Indonesia on 17 August 1945. On 18 August 1945 he became the committee of preparation of Indonesian Independence (PPKI) to take a decision, to ratify and enact the Constitution as the basis of the state of the Republic of Indonesia , hereinafter known as the 1945 Constitution. Thus, the Government of the Unitary State of Republic of Indonesia (Republic of Indonesia) with the sovereignty in the hands of the people is carried out entirely by the People's Consultative Assembly (MPR) which will be formed later. Soekarno and Moh.Hatta was Indonesia's first president and vice president, he led Indonesia from 1945 to 1966 he played an important role to liberate the Indonesian nation from the Dutch colonists. The formulation of the problem in this research is "(1) How Conflict In Soekarno-Hatta Government Post Proclamation of Independence of RI in 1945-1966 and (2) What Factors Influence Conflict In Soekarno-Hatta Government Post Indonesian Independence Proclamation in 1945 -1966 ".

Conflict that occurred in Soekarno-Hatta Government post-proclamation RI In know 1945-1966 is a form of power struggle and others. The following is the result of research conducted by researchers related to conflict cases in Soekarno-Hatta Government post Proclamation of RI in 1945-1966 that ever happened in Indonesia, such as: (1) The event of Coup of RatuAdil War which happened in 1950, (2) The Islamic State of Indonesia (NII) that occurred in 1949, (3) PKI rebellion which took place in 1965, and (4) The March 11 warrant issued in 1966.

Keywords : Conflict, Soekarno-Hatta Government, Post-Proclamation 1945-1966

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah adalah suatu pengalaman yang tak ternilai harganya. Dengan melihat sejarah makna dan hakekat perjuangan rakyat Indonesia dalam revolusi kemerdekaan, maka perlu untuk ditelaah dan ditulis agar dapat dipetik hikmahnya. Mengingat betapa pentingnya peristiwa sejarah rakyat Indonesia, maka dapat dijadikan prespektif persoalan masa kini yang diharapkan dapat memberikan pemahaman untuk menentukan kebijakan dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan aspek- aspek lokal.

Konflik dapat terjadi diberbagai lapisan struktur masyarakat. Konflik dapat terjadi secara vertikal antara elit lokal dengan elit nasional, maupun horizontal antar sesama elit dalam struktur yang sama. Selain itu, konflik juga dapat muncul secara paralel, vertikal maupun horisontal. Konflik yang muncul dikalangan pemerintah berimplikasi terhadap goyahnya stabilitas politik yang ada. John Higley dan Michael G. Burton (1987:17-18) yang menghidupkan teori konflik dalam pemerintahan dalam korelasinya dengan transisi menuju demokrasi. Kedua pakar ini membagi tiga tahap struktur dalam proses transisi.

Semua negara yang berhasil bertransisi ke demokrasi dianggap berhasil mentransformasi struktur itu. Para petinggi Pemerintahan atas keinginan mereka sendiri mengambil inisiatif untuk menerapkan prosedur demokrasi sebagai cara menyelesaikan perbedaan diantara mereka.

Teori konflik ini adalah literatur mutakhir dalam teori transisi menuju demokrasi. Teori sebelumnya terlalu banyak menekankan faktor struktural,

seperti faktor ekonomi ataupun kultur, namun melupakan factor-faktor politik yang mampu membuat hasil politik berbeda. Sebelumnya, demokrasi dianggap hanya realistik bagi negara yang telah melampaui tingkat ekonomi tertentu. Hanya negara yang secara ekonomi cukup kaya yang mampu memiliki demokrasi yang stabil. Alasannya sederhana, memerlukan kelas menengah yang dianggap pendukung utama demokrasi seperti ungkapan Barrington Moore yang terkenal dan didukung adalah tanpa kelas menengah tidak ada demokrasi. Hanya negara yang relatif kaya yang memiliki mayoritas kelas menengah, yang terdidik dan berpenghasilan cukup.

Seperti yang kita ketahui bahwa Soekarno dan Moh. Hatta dikenal sebagai Bapak Proklamator beliau mempunyai peran penting dalam memerdekakan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945. Pada tanggal 18 agustus 1945 beliau menjadi panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian. Soekarno dan Moh. Hatta adalah presiden dan wakil presiden Indonesia pertama, beliau memimpin Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan 1966 ia memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah belanda. Menurut catatan sejarah ada banyak konflik-konflik besar pada masa kepemimpinannya hingga akhirnya pada 20 Februari 1966 Soekarno

menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan di istana merdeka, dengan ditandatanganinya surat tersebut maka Soeharto De Facto resmi menjadi kepala pemerintahan Indonesia dan setelah melakukan sidang istimewa maka MPRS pun resmi mencabut kekuasaan presiden Soekarno.

Selain itu, Soekarno dan Moh. Hatta juga berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar (ideologi) Negara Kesatuan Republik Indonesia beliau berupaya mempersatukan nusantara. Bahkan Soekarno berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika latin dengan konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian menjadi Gerakan Non- Blok.

Dalam masa pemerintahan Soekarno dan Hatta seperti banyak ditulis oleh para sejarawan bahwa banyak sekali terjadi konflik yang terjadi pada kelas atas sehingga konflik-konflik yang terjadi pada masa itu adalah bukti sejarah bahwa pada masa kepemimpinan Soekarno-Hatta tercatat beberapa konflik kepentingan antara kaum borjuis, militer, PKI, parpol keagamaan, dan kelompok-kelompok nasionalisme lainnya. Oleh karena itu, situasi di Indonesia pada masa itu semakin kacau karena hanya mementingkan kepentingan partai masing-masing. Keinginan rakyat agar pemerintahan berjalan sesuai UUD 1945 jauh dari harapan dengan berlakunya Sistem politik Demokratis terpimpin.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini kedalam suatu penelitian ilmiah yang berjudul “Konflik Dalam Pemerintahan Soekarno-Hatta Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945-1966”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka perlu dirumuskan masalah agar penelitian ini terarah dan mengena pada tujuan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Konflik Dalam Pemerintahan Soekarno-Hatta Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945-1966?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Konflik Dalam Pemerintahan Soekarno-Hatta Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945-1966?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan mengetahui Konflik Dalam Pemerintahan Soekarno-Hatta Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945-1966.
2. Mendeskripsikan dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Konflik Dalam Pemerintahan Soekarno-Hatta Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945-1966.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat kepada berbagai pihak secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para ilmuwan yang menggeluti dalam bidang pendidikan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pemikiran yang ilmiah, serta memberikan motivasi dan dorongan bagi peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan dengan bahasa yang lebih mendalam tentang Konflik Dalam Pemerintahan Soekarno-Hatta Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945-1966 dan berusaha mengungkapkan faktor-faktor lain yang belum diungkapkan dalam penelitian ini, agar hasil penelitian ini lebih komprehensif.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga pendidikan khususnya sebagai acuan dalam memberikan pembinaan dan bimbingan kepada peneliti dalam rangka mengungkapkan berbagai macam fenomena yang timbul di tengah masyarakat baik pada lingkungan sendiri khususnya di luar pada umumnya.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi calon guru untuk mengetahui potensi dan pengembangan masyarakat serta perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang sejarah dan masalah Konflik Dalam Pemerintahan Soekarno-Hatta Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945-1966. Semoga penelitian ini bisa menjadi acuan dikemudian hari, bagi kaum akademis yang ingin mengkaji lebih jauh terhadap Konflik Dalam Pemerintahan Soekarno-Hatta Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945-1966.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konflik

Menurut Robert H. Laure (2000:287) konflik adalah mekanisme yang mendorong perubahan. Konflik berpengaruh efektif terhadap seluruh tingkat realitas sosial bahkan pada tingkat individual terdapat bukti yang menunjukkan bahwa perkembangan kecerdasan logika dapat dipercepat melalui konflik kognitif secara sengaja. Konflik berperan penting dalam menyukseskan gerakan sosial. Berlawanan dengan apa yang diperkirakan orang, konflik internal dalam satu gerakan sosial mungkin lebih berdampak positif ketimbang negatif. Sedangkan menurut Adam Kuper (dalam Hafsah, 2012:10) konflik adalah prespektif yang mewarnai setiap aspek interaksi manusia dan struktur sosial atau pertikaian terbuka seperti perang, revolusi, pemogokan dan gerakan perlawanan.

Konflik adalah konsep menggeneralisasikan berbagai analisis yang menggunakan pendekatan konflik agar dapat dibedakan dari pendekatan fungsionalis pertukaran atau sistematis. Pada dasarnya pendekatan ini mencoba untuk menjelaskan bukan hanya bagaimana suatu tatanan sosial terpelihara meskipun di dalamnya terdapat banyak kesejangan, namun juga bagaimana struktur sosial mengalami perubahan. Pendekatan ini memandang masyarakat, organisasi dan berbagai sistem sosial lainnya sebagai ajang pertandingan perorangan dan kelompok. Kesesuaian kepentingan dan kerjasama tidak diabaikan, namun perhatian memang lebih diberikan pada karakter persaingan atau ketidaksesuaian. Pemaksaan dipandang sebagai cara utama bagi setiap orang untuk mencapai keinginannya. Di dalam pihak diasumsikan pula bahwa manusia

pada umumnya tidak ingin didominasi atau dipaksa, sehingga setiap kali ada pemaksaan mereka akan berusaha melawan.

Menurut Kuper (dalam Hafsa, 2012:11) teori konflik dapat dilacak dari pemikiran sebagai mana penguasa mempertahankan kekuasaannya. Cikal bakal teori ini dapat kita temukan pada tulisan-tulisan Thucydides dan Hobbs, beliau menekankan pentingnya kondisi- kondisi material yang melandasi konflik, terutama konflik kelas yang didasari hubungan-hubungan kepemilikan. Para teori konflik lainnya memilih konteks pemikiran revolusioner dalam mengamati pertikaian antar kelompok. Mereka mengakui arti penting kepentingan dan kekuatan militer, meskipun dalam taraf yang berbeda- beda, tanpa mengabaikan aspek- aspek penting lainnya seperti perbedaan etnik, yang sekaligus merupakan alasan bagi adanya usaha- usaha penaklukan dan perang. Simmel adalah sosiolog klasik yang memusatkan perhatiannya untuk mempelajari berbagai bentuk dan konsekuensi konflik.

Minat untuk mempelajari konflik mulai bangkit kembali, paling tidak di Negara-negara yang berbahasa Inggris pada tahun 1960-an. Sebelumnya teori-teori ilmu sosial yang lebih menonjol adalah yang melihat masyarakat berdasarkan konsensus dan kesepakatan. Namun maraknya kekacauan politik selama 1960- an, baik ditingkat domestik maupun internasional, mengubah situasi sehingga pendekatan konflik kembali menonjol.

Robert H. Lynd (2000:288) Para teori konflik memberi penekanan yang berbeda-beda dan hal ini memperkaya khasanah pemikiran mengenai konflik. Banyak diantaranya yang berpedoman pada pemikiran Marx, meskipun mereka

sendiri memiliki pemikiran yang saling berlainan terhadap pemikiran Max itu sendiri. Sebagai contoh Gramsci menekankan pentingnya hegemoni cultural kelas penguasa sebagai bentuk dominasi. Sedangkan Dahrendorf berpendapat bahwa hubungan-hubungan kekuasaanlah, bukan hubungan kepemilikan yang melandasi konflik. Collins menganggap pemaksaan termasuk kekerasan sebagai cara pentingnya untuk menciptakan control, meskipun ia juga mengakui pentingnya simbol dalam konflik, baik itu ditingkat individual maupun sosial struktural.

Studi mengenai pembangunan ekonomi juga menggunakan pendekatan konflik yang menekankan bagaimana kekuasaan ekonomi, politik dan militer dimanfaatkan dan bertanggung jawab atas terjadinya pertukaran yang tidak adil yang selanjutnya menciptakan suatu sistem ekonomi kepentingan. Pemikiran seperti nilai yang dianut oleh para teori ketrebelakangan di dunia ketiga.

Kuper (dalam Hafsah, 2012:12) para ilmuwan sosial berusaha memahami jenis konflik yang berlangsung dalam konteks hubungan saling bergantung dan hubungan pertukaran yang melembaga. Fokus ini perlu dilakukan karena jenis konflik itu sendiri cukup banyak, yakni mulai dari perang terbuka, revolusi, pemogokan buruh, kerusuhan rasial sampai dengan perkelahian antar individu. Namun para ilmuwan sosial sampai sekarang masih mencari penyebab-penyebab konflik secara umum, pola-pola eskalasinya, cara penyelesaian dan berbagai konsekuensi yang ditimbulkannya. Ini biasa dipahami karena antara satu jenis konflik dengan yang lainnya terdapat kemiripan, meskipun variasi juga selalu ada. Dari sekian banyak, ada juga variasi terpenting yang saling terikat, yakni karakter pihak yang berkonflik, hakikat tujuan serta sarana yang digunakan dalam konflik itu sendiri yaitu:

1. Pihak yang berkonflik dapat dibedakan atas dasar tingkat organisasi dan kelompoknya. Pada titik ekstrim yang satu kita melihat pemerintah, serikat buruh dan berbagai entitas lainnya yang memiliki peraturan keanggotaan dan pedoman tindakan yang ketat. Sedangkan pada titik ekstrim lainnya kita melihat entitas- entitas longgar yang bersifat abstrak seperti kelas sosial atau melibatkan banyak pihak yang antara satu sama lain terkadang tumpang tindih. Misalnya saja pemerintah sering berbicara mengatasnamakan pemerintah sendiri, negara secara keseluruhan, rakyat, ideologi, fraksi partai politik tertentu, atau bahkan kelas sosial tertentu. Setiap pernyataan diarahkan pada pihak yang berbeda- beda dan inilah yang membuat karakter konflik begitu kompleks.
2. Konflik pada dasarnya terjadi karena adanya pertentangan tujuan dan tujuan itu sendiri juga berfariasi mulai dari penguasa tana, perebutan uang atau sekedar perikaaian atas hal- hal sederhana yang dianggap bernilai tinggi bagi pihak- pihak tertentu. Konflik yang terjadi karena memperebutkan sesuatu yang mengandung nilai materi disebut sebagai konflik konsensual. Hampir setiap konflik bisa disebut konflik konsensual , karena setiap tujuan atau kepentingan yang terlibat, mulai dari hal- hal yang menyangkut kebutuhan dasar manusia Menurut Kuper (dalam Hafsah, 2012:14).
3. Konflik dapat pula dibedakan atas dasar cara digunakan. Cara itu sendiri sangat berfariasi mulai dari pemaksaan terang- terangan, ancaman samapi dengan bujukan misalnya bujukan dari partai politik dalam pemilihan umum. Bila suatu konflik yang sama terus berulang, maka konflik itu akan terus

melembaga dan cara- caranyapun dilembagakan pula. Contohnya adalah konflik antara penguasa dan buruh yang sudah berlangsung sejak abad 19.

Di samping aspek teoritisnya, nilai orientasi orang-orang yang terlibat juga penting dalam studi konflik. Ada sebagian teori yang mencoba memahami konflik sosial dari perspektif partisan dan ia mencoba memahami konflik dari prespektif partisan dan mencoba mempelajari bagaimana salah satu pihak berjuang memenuhi kepentingannya. Para ahli strategi militer dan pejuang kemerdekaan termasuk dalam golongan ini. Ada pula mereka yang berusaha meminimalkan kekerasan dan mencari Cara-cara alternatif untuk mempertahankan diri sekaligus mencapai tujuannya tanpa harus menumpahkan darah. Yang paling menarik adalah ada pihak tertentu yang terlibat dalam konflik bukan untuk mencapai suatu tujuan melainkan untuk menikmati konflik itu sendiri Rubent H. Laure (2000: 289).

Studi tentang konflik juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi sosial dimana peneliti berada dan juga kecenderungan intelektual dan pengaruh paradigma yang berlaku. Sebagai contoh di Amerika 1950-an konflik dipandang sebagai sesuatu yang tidak realistis dan tidak bisa diandalkan untuk mencapai tujuan, baik itu ditingkan individual maupun sosial. Sedangkan akhir 1960-an dan 1970-an konflik justru dipandang sebagai bentuk ketidakadilan. berikutnya pada tahun 1980-an, konflik dipandang sebagai suatu hal yang wajar akibat adanya perbedaan kepentingan.

2.1.1 Bentuk-bentuk Konflik

Dalam teori konflik terdapat beberapa bentuk konflik dan tujuan pada permasalahan konflik, seperti yang dikemukakan oleh para ilmuwan barat, masalah

konflik tidak mengenal demokratisasi maupun diktatorisasi dan bersifat universal. Menurut teori Fisher, pola konflik dibagi dalam tiga bentuk: (1) konflik laten yaitu konflik yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif, (2) konflik manifes atau terbuka yaitu konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai macam efeknya, dan (3) sedangkan konflik permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat diatasi dengan menggunakan komunikasi.

Menurut Alison dan Wallace (dalam Sapto, 2013:44), teori konflik memiliki tiga asumsi utama, dimana satu dengan yang lain saling berhubungan adapun yang *pertama*, bahwa manusia memiliki kepentingan yang asasi dan mereka berusaha untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan itu *kedua*, yaitu menunjukkan “*power*” (kekuasaan) bukanlah sekedar barang langka dan terbagi secara tidak merata, sehingga merupakan sumber konflik, melainkan juga sesuatu yang bersifat memaksa (*coercive*) yang kedua ini menempati posisi sentral bagi perspektif teori konflik *power* dipandang sebagai “*coredarsocial relation sehips*”. *Ketiga*, ideologi dan nilai-nilai dipandanginya sebagai senjata yang digunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-masing.

Menurut Coser ada dua bentuk dasar konflik yaitu konflik realistik dan konflik non-realistik. Konflik realistik adalah konflik yang mempunyai sumbu kongkrit atau bersifat material, seperti perebutan wilayah atau kekuasaan, dan

konflik ini bisa teratasi kalau diperoleh dengan merebut tanpa perkelahian dan pertikaian. Konflik non-realistis adalah konflik yang didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, seperti konflik antar agama dan organisasi-organisasi masyarakat, dan konflik non-realistis adalah suatu cara mempertegas atau menurunkan ketegangan suatu kelompok (Sapto, 2013:44-46).

Dalam organisasi dan ilmu perilaku organisasi, kita dapat membagi konflik menjadi tiga macam/jenis yaitu:

2.1.2 Konflik berdasarkan pihak yang terlibat dalam konflik

Terdapat tiga macam konflik yang ada apabila dilihat dari pihak yang terlibat konflik yaitu antara individu dan individu atau one on one, konflik antara individu dengan kelompok dan terakhir konflik antara kelompok dengan kelompok.

1) Konflik antara individu dengan individu yang lain

Dalam perilaku organisasi dan masyarakat pula, konflik ini sering terjadi baik oleh anggota dengan anggota tertentu yang sederajat atau setingkat, oleh bawahan dengan atasan bahkan sering juga terjadi pertentangan atau konflik antara anggota dengan pimpinan organisasi. Dalam ilmu komunikasi dan sosiologi, hal ini dijelaskan diakibatkan oleh adanya perbedaan paham dan tujuan serta adanya ego pribadi dan kurangnya komunikasi. Walaupun begitu, konflik yang ada dalam organisasi tidak dapat juga dipandang sebagai hal yang buruk, akan tetapi dapat menjadi pemacu dalam meningkatkan kinerja tiap anggota, disinilah peran manajer atau pimpinan dalam mengarahkan konflik tersebut.

2) Konflik yang terjadi antara individu dengan kelompok

Awal dari konflik antara individu dengan kelompok adalah konflik individu dengan individu lain dalam organisasi ataupun masyarakat. Pihak yang awalnya hanya sendiri akan mendapatkan dukungan dari pihak lain yang memiliki pemahaman yang sama ataupun kepentingan di dalamnya. Contoh konflik seperti ini dalam organisasi yaitu adanya sekelompok bawahan yang meminta kenaikan gaji kepada pimpinan perusahaan ataupun organisasi atau mengadakan mogok kepada pimpinan agar permintaan mereka dikabulkan. Langkah yang tepatlah bila seorang pemimpin dengan cepat mengontrol tiap konflik yang ada dengan langkah taktis.

3) Konflik yang terjadi antara kelompok dengan kelompok

Banyak organisasi, institusi dan lembaga yang besar yang memiliki banyak partisi di dalamnya yang mengalami konflik seperti ini. Dalam masyarakat lebih sering lagi, contohnya konflik antar kampung, jalan dan banyak lagi (lihat saja berita). Perlu disadari bahwa konflik yang terjadi antara kelompok dengan kelompok jarang kondusif, lebih mengarah ke hal hal yang ribut dan berlarut larut. Hal ini tentu saja disebabkan oleh ada dua kepentingan yang dihadapkan oleh banyak pihak yang berselisih, sehingga bila satu saja dari dua kelompok yang berkonflik yang ingin berdamai, maka belum cukup, harus seluruh anggota kedua kelompok yang harus memahami dan berdamai akan masalah tersebut (Learniseasy, 2010).

2.1.3 Dampak Konflik

Menurut Fisher suatu konflik tidak selalu berdampak negatif tapi adakalanya konflik memiliki dampak positif. Dampak positif dari suatu konflik adalah sebagai berikut : (1) konflik dapat menjelaskan sebagai aspek kehidupan yang belum tuntas. (2) adanya konflik menimbulkan kembali penyesuaian norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. (3) konflik dapat meningkatkan solidaritas diantara anggota kelompok. (4) konflik dapat mengurangi rasa ketergantungan terhadap individu dan kelompok. (5) konflik dapat menimbulkan kompromi baru. Dampak negatif dari suatu konflik adalah sebagai berikut: (1) keretakan hubungan antara individu dan persatuan kelompok. (2) kerusakan harta benda bahkan dalam tingkat konflik yang lebih tinggi dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. (3) perubahan kepribadian para individu atau anggota kelompok. (4) munculnya donasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah.

Konflik politik terbentuk karena adanya penguasa politik. Karena tidak ada masyarakat yang mempunyai penguasa politik artinya, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai konflik politik yang terutama adalah konflik antar penguasa politik dalam melihat objek kekuasaan politik. Konflik dapat terjadi karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi atau karena alternatif yang dinilai sulit didapat. Konflik dapat pula didefinisikan sebagai suatu perbedaan persepsi mengenai kepentingan bermanfaat untuk meramalkan apa yang dilakukan orang. Hal ini disebabkan persepsi yang biasanya mempunyai dampak yang bersifat terhadap perilaku (Sapto, 2013:44-47).

2.2 Pemerintahan

Pengertian pemerintahan adalah sebuah organisasi yang berkuasa dan memiliki kebijakan dalam membuat, menjalankan dan menerapkan serta mengevaluasi undang-undang dan hukum pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang dikuasainya. Dan aturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut berlaku tidak hanya bagi pemerintah melainkan siapa saja yang berada di daerah tersebut. Atau dengan kata lain pengertian pemerintah adalah suatu organisasi atau badan atau lembaga yang dalam kesehariannya bertugas untuk menerapkan kebijakan dalam mengelola, dan mengatur jalannya pemerintahan yang meliputi legislatif, eksekutif maupun yudikataif. Oleh karena itu, definisi pemerintah tidak bisa lepas atau berkaitan erat dengan pemerintahan.

Pemerintah merupakan kemudi dalam bahasa latin asalnya *Gubernaculum*. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah berbeda dengan pemerintahan. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan arti pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Haryanto, 1997:9-10)

Jika pemerintah adalah lebih kearah organ, pemerintahan menunjukkan kearah bidang dan fungsi. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga tempat mereka menjalankan aktivitas. Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara (Haryanto dkk, 1997:2-3).

C.F Strong mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai segala aktivitas badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

2.3 Pemerintahan Soekarno-Hatta

Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, Panitia Kecil yang terdiri dari delapan orang (resmi), Panitia Kecil yang terdiri dari sembilan orang/Panitia Sembilan (yang menghasilkan Piagam Jakarta) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, Soekarno-Hatta mendirikan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Setelah menemui

Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah Peristiwa Rengas dengkllok pada tanggal 16 Agustus 1945 Soekarno dan Mohammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan Pembela Tanah Air Peta Rengas dengkllok. Tokoh pemuda yang membujuk antara lain Soekarno, Wikana, Singgih serta Chairul Saleh. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang sudah menyerah dan pasukan Sekutu belum tiba. Namun Soekarno-Hatta dan para tokoh menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Alasan lain yang berkembang adalah Soekarno menetapkan momen tepat untuk kemerdekaan Republik Indonesia yakni dipilihnya tanggal 17 Agustus 1945 saat itu bertepatan dengan bulan Ramadhan, bulan suci kaum muslim yang diyakini merupakan bulan turunnya wahyu pertama kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW yakni Al Qur-an.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945 pengangkatan menjadi presiden dan wakil presiden dikukuhkan oleh KNIP. Pada tanggal 19 September 1945 kewibawaan Soekarno dapat menyelesaikan tanpa pertumpahan darah peristiwa Lapangan Ikada tempat 200.000 rakyat Jakarta akan bentrok dengan pasukan Jepang yang masih bersenjata lengkap.

Pada saat kedatangan Sekutu (AFNEI) yang dipimpin oleh Letjen. Sir Phillip Christison, Christison akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto

setelah mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno juga berusaha menyelesaikan krisis di Surabaya. Namun akibat provokasi yang dilancarkan pasukan NICA (Belanda) yang membonceng Sekutu (di bawah Inggris), meledaklah Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya dan gugurnya Brigadir Jenderal A.W.S Mallaby. Karena banyak provokasi di Jakarta pada waktu itu, Presiden Soekarno akhirnya memindahkan Ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Diikuti wakil presiden dan pejabat tinggi negara lainnya.

Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah kedudukan Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara (*presidensiil/single executive*). Selama revolusi kemerdekaan, sistem pemerintahan berubah menjadi semi *presidensiil/double executive*. Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara dan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri/Kepala Pemerintahan. Hal itu terjadi karena adanya maklumat wakil presiden No X, dan maklumat pemerintah bulan November 1945 tentang partai politik. Hal ini ditempuh agar Republik Indonesia dianggap negara yang lebih demokratis. Meski sistem pemerintahan berubah, pada saat revolusi kemerdekaan, kedudukan Presiden Soekarno tetap paling penting, terutama dalam menghadapi Peristiwa Madiun 1948serta saat Agresi Militer Belanda II yang menyebabkan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara ditahan Belanda.

Meskipun sudah ada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan ketua Sjafruddin Prawiranegara, tetapi pada kenyataannya dunia internasional dan situasi dalam negeri tetap mengakui bahwa Soekarno-Hatta

adalah pemimpin Indonesia yang sesungguhnya, hanya kebijakannya yang dapat menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda (Nalia, 2011: 17)

Pada masa kemerdekaan Soekarno dan Josip Broz Tito, Setelah Pengakuan Kedaulatan (Pemerintah Belanda menyebutkan sebagai Penyerahan Kedaulatan) , Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Mohammad Hatta diangkat sebagai perdana menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr Assaat, yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa-Yogya. Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mr Assaat sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Ir. Soekarno. Resminya kedudukan Presiden Soekarno adalah presiden konstitusional, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengannya. Mitos Dwitunggal Soekarno-Hatta cukup populer dan lebih kuat di kalangan rakyat dibandingkan terhadap kepala pemerintahan yakni perdana menteri. Jatuh banggunya kabinet yang terkenal sebagai "kabinet seumur jagung" membuat Presiden Soekarno kurang memercayai sistem multipartai, bahkan menyebutnya sebagai "penyakit kepartaian". Tak jarang, ia juga ikut turun tangan menengahi konflik-konflik di tubuh militer yang juga berimbas pada jatuh banggunya kabinet. Seperti peristiwa 17 Oktober 1952 dan Peristiwa di kalangan Angkatan Udara.

Presiden Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia Internasional. Keprihatinannya terhadap nasib bangsa Asia-Afrika, masih belum merdeka, belum mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, menyebabkan presiden Soekarno, pada tahun 1955, mengambil inisiatif untuk mengadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasasila Bandung. Bandung dikenal sebagai Ibu Kota Asia-Afrika. Ketimpangan dan konflik akibat "bom waktu" yang ditinggalkan negara-negara barat yang dicap masih mementingkan imperialisme dan kolonialisme, ketimpangan dan kekhawatiran akan munculnya perang nuklir yang mengubah peradaban, ketidakadilan badan-badan dunia internasional dalam penyelesaian konflik juga menjadi perhatiannya. Bersama Presiden Josip Broz Tito (Yugoslavia), Gamal Abdel Nasser (Mesir), Mohammad Ali Jinnah (Pakistan), U Nu, (Birma) dan Jawaharlal Nehru (India) ia mengadakan Konferensi Asia Afrika yang membuahkan Gerakan Non Blok. Berkat jasanya itu, banyak negara Asia Afrika yang memperoleh kemerdekaannya. Namun sayangnya, masih banyak pula yang mengalami konflik berkepanjangan sampai saat ini karena ketidakadilan dalam pemecahan masalah, yang masih dikuasai negara-negara kuat atau adikuasa. Berkat jasa ini pula, banyak penduduk dari kawasan Asia Afrika yang tidak lupa akan Soekarno bila ingat atau mengenal akan Indonesia.

Guna menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif dalam dunia internasional, Presiden Soekarno mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara. Di antaranya adalah Nikita Khrushchev (Uni

Soviet), John Fitzgerald Kennedy (Amerika Serikat), Fidel Castro (Kuba), Mao Tse Tung (RRC) (Nalia, 2011: 24).

2.4 Proklamasi Kemerdekaan

Proklamasi merupakan kata yang berasal dari Yunani yaitu *proclamation* yang mempunyai arti pengumuman kepada seluruh masyarakat. Pengumuman tersebut khususnya menyangkut dengan hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Proklamasi kemerdekaan adalah pengumuman kepada seluruh masyarakat tentang akan adanya kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan juga diartikan sebagai pernyataan yang diberitahukan kepada masyarakat negara yang bersangkutan dan kepada dunia luar bahwa negara tersebut sudah merdeka dan terlepas dari penjajahan negara lain.

Pemberitahuan akan adanya kemerdekaan sejatinya tidak hanya ditujukan kepada masyarakat dari negara tersebut melainkan kepada masyarakat dari belahan dunia mana pun dan kepada semua bangsa yang ada di muka bumi. Dengan Proklamasi Kemerdekaan yang sudah dikumandangkan kepada warga dunia maka terlahirlah negara baru yang telah bebas dari penjajahan negara lain. Dengan proklamasi kemerdekaan maka lahirlah sebuah negara baru yang mempunyai kedudukan yang sama dengan negara-negara lain yang sudah ada sebelumnya.

Proklamasi merupakan langkah awal munculnya negara baru dengan tatanan kenegaraannya harus dihormati oleh negara-negara lain di dunia. Proklamasi kemerdekaan bagi suatu bangsa bisa jadi merupakan puncak revolusi tonggak sejarah perjuangan bangsa tersebut yang sudah lama menanti-nantikan

kebebasan dari belenggu para penjajah. Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa yang belum merdeka adalah suatu yang sangat diharapkan agar terlaksana karena dengan proklamasi kemerdekaan bangsa tersebut bisa hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Dengan proklamasi kemerdekaan, bangsa tersebut bisa meningkatkan taraf kehidupan bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan untuk suatu bangsa adalah hal yang tidak ternilai harganya sehingga untuk meraihnya suatu bangsa harus berjuang dengan mati-matian dan penuh pengorbanan. Pada dasarnya, proklamasi kemerdekaan bagi satu bangsa mempunyai maksud untuk; (a) Melepaskan diri dari belenggu penjajah bangsa lain, (b) Bisa hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lainnya yang sudah merdeka di pergaulan antar bangsa di dunia internasional, dan (c) Meraih tujuan bangsa.

Menurut M Mardojo SH (1985) proklamasi kemerdekaan Indonesia bila ditinjau lebih lanjut ternyata mengandung beberapa aspek yaitu; (1) dari sudut ilmu hukum proklamasi atau pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia di atas telah menghapuskan tata hukum kolonial untuk pada saat itu juga diganti dengan suatu tata hukum nasional (Indonesia), dan (2) dari sudut politis ideologis proklamasi berarti bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu penjajahan dan sekaligus membangun perumahan baru yaitu perumahan negara proklamasi RI yang bebas merdeka dan berdaulat (tribunnews, 2010)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang harus digunakan untuk memperoleh hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada bab ini dikemukakan hal-hal yang menyangkut tata cara yang dimaksudkan adalah gambaran mengenai langkah-langkah yang berkaitan dengan (1) jenis dan pendekatan penelitian, (2) batasan spesial, (3) batasan temporal, (4) data dan sumber data, (4) metode historis, (5) analisis data, dan (6) keabsahan data.

3.1 Jenis Penelitian

. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang dan perilaku yang dapat diamati Bogdan dan Tailor (dalam Meleong, 2012:4). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif karena mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang diamati dari individu, kelompok, masyarakat dan atau satu organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik Bogdan dan Tailor (dalam Basrowi, 2008:22-23).

Moleong (2007:6) mengatakan bahwasanya pertama, pendekatan kualitatif lebih mudah apabila terdapat kenyataan ganda. Kedua, Pendekatan ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian dengan responden. Ketiga, Pendekatan ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan

dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang di hadapi.

Pendekatan kualitatif tersebut memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis rekaman dan peninggalan masa lampau yang berkaitan dengan Konflik Dalam Pemerintahan Soekarno-Hatta Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945-1966.

3.2 Batasan Spasial

Data yang memiliki referensi kebumian (*georeference*) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial. Data spasial merupakan data yang berkaitan dengan lokasi keruangan sedangkan data atribut merupakan data non-spasial yang berfungsi menjelaskan berbagai obyek pada data spasial tersebut.

Penulisan dalam mengadakan penelitian, hanya berorientasi pada sumber yang terdapat di dalam buku yang dapat menjamin hasil yang lebih baik mengingat keterbatasan waktu, sumber dan kemampuan yang dimiliki maka penelitian perlu diberikan batasan terhadap masalah yang akan teliti dalam penelitian ini, yaitu terjadinya Konflik Dalam Pemerintahan Soekarno-Hatta Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945-1966.

3.3 Batasan Temporal

Batasan temporal yaitu penelitian pembatasan tahun atau waktu penelitian ini didasarkan pada tempat atau waktu terjadinya Konflik Dalam Pemerintahan Soekarno-Moh. Hatta Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945-1966 Dalam penelitian ini waktu yang difokuskan oleh peneliti adalah pasca Kemerdekaan RI pada tahun 1945-1966. Peneliti membatasi waktu penelitiannya

karna dilihat dari Konflik Dalam Pemerintahan Soekarno-Hatta Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI yang terjadi saat itu sekitar tahun 1945 dimana telah terjadi berbagai kegagalan-kegagalan secara berturut-turut terjadi di Indonesia sehingga menimbulkan harapan-harapan yang tinggi khususnya dalam Pemerintahan Soekarno-Hatta pada tahun 1945-1966.

3.4 Data dan Sumber data

Data adalah deskripsi dari suatu kejadian yang dihadapi (Sugiono, 2010:67) adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang berbentuk kalimat, kata atau gambaran atau data yang tidak dapat diukur nilainya secara langsung yang dinyatakan dalam bentuk atau pernyataan. Adapun dalam penelitian ini adalah permasalahan tentang Konflik Dalam Pemerintahan Soekarno-Hatta Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945-1966.

3.4.1 Sumber Data

Arikunto (2010:172) menyatakan sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data menurut sifatnya digolongkan menjadi (dua) yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil observasi tentang Konflik Dalam Pemerintahan Soekarno-Hatta Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945-1966.
2. Sumber data skunder adalah mengutip dari sumber lain yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan

contohnya data tentang Konflik Dalam Pemerintahan Soekarno-Hatta Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945-1966.

3.5 Metode Historis

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode historis yang merupakan suatu metode yang lazim digunakan dalam penelitian sejarah. dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka dalam melakukan pengumpulan data digunakan teknik studi pustaka.

Teknik studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen atau sumber tulisan lainnya yang berhubungan dan mendukung terhadap permasalahan dari penelitian. Setelah sumber literatur terkumpul dan dianggap sebagai bahan penelitian, selanjutnya dipelajari, dikaji, dan diklasifikasikan, setelah itu memisahkan sumber-sumber yang kurang relevan.

Saat melaksanakan suatu penelitian biasanya menggunakan serangkaian langkah-langkah atau prosedur kerja kegiatan penelitian agar hasil penelitian tersebut mencapai hasil yang maksimal. Menurut Kuntowijoyo dalam Priyadi, Sugeng (2012:3) metode penelitian historis terdiri dari (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik ekstern dan kritik intern), (4) interpretasi (analisis dan sintesis), dan (5) penulisan, sedangkan menurut Susanto dalam Priyadi, Sugeng (2012 : 3) meliputi (1) heuristik (menvari sumber-sumber), (2) kritik atau analisis (menilai sumber-sumber), (3) interpretasi atau sintesis (menafsirkan keterangan sumber-sumber), dan (4) historiografi (penulisan sejarah).

3.6 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2014:226)

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Sehingga peneliti jenuh antara berpikir data yang ada dan mengembangkan strategi untuk mengumpulkan data baru dan melakukan koreksi terhadap informasi yang kurang jelas dan mengarahkan analisis.

Analisis data model Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) tahap yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

3.6.1 Reduksi Data

Data yang telah di kumpulkan dari berbagai sumber tidak dapat dipungkiri jumlahnya cukup banyak sehingga di sinilah kita dituntut dan berusaha untuk dapat memilih dan memilah data secara teliti agar peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam tahap selanjutnya. Reduksi data dapat didefinisikan sebagai proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan itu dinamakan Reduksi Data. Reduksi data akan berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitian memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilih. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (meringkas, menkode, menelusur tema, membuat gugus, membuat memo). Reduksi data ini berlanjut terus sampai laporan akhir lengkap tersusun.

3.6.2 Data Display (penyajian data)

Setelah melakukan reduksi data, selanjutnya akan dilakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk: uraian, singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Miles and Huberman (1984) menyatakan: yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Miles dan Huberman membantu para peneliti kualitatif dengan model-model penyajian data yang analog dengan model-model penyajian data kuantitatif statis, dengan menggunakan tabel, grafik, matriks dan sebagainya; bukan diisi dengan angka-angka melainkan dengan kata atau *phase* verbal.

Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif juga dapat berupa: bagan, hubungan antar kategori, diagram alir (*flow chart*), *pictogram*, dan sejenisnya. Kesimpulan yang dikemukakan ini masih

bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

3.6.3 Penarikan/Verifikasi kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013: 345) dan adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan mana data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan.

3.7 Keabsahan Data

Keabsahan data penelitian dapat dilihat dari kemampuan menilai data dari aspek validitas dan reliabilitas data penelitian. Untuk menguji validitas penelitian

dapat dilakukan dengan metode triangulasi di mana peneliti menemukan kesepahaman dengan subjek penelitian. Sedangkan reliabilitas dapat dilakukan dengan melakukan atau menerapkan fieldnote atau catatan lapangan dengan prosedur yang akan ditetapkan (Sugiyono, 2010:65). Agar mendapatkan gambaran yang memuaskan dari sebuah hasil wawancara, karena penelitian ini menerapkan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok, menurut Sugiyono (2010:66), validitas dan reliabilitas data hasil penelitian sangat diperlukan adanya, pembuktian ini dapat dilakukan dengan cara “*tringulasi*” yaitu peneliti melakukan pengecekan kembali sejumlah data yang telah terkumpul baik data sekunder maupun data primer. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji keabsahan data serta untuk mengambil hasil komparatif antara konsep teoritis dengan praktikal terhadap permasalahan Konflik Dalam Pemerintahan Soekarno-Hatta Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945-1966.

